



RENJA SKPD TAHUN 2024

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TANAH LAUT**



DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	13
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	13
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	28
2.4. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	32
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	34
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional	34
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	35
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	39
4.1. Program dan Kegiatan	39
BAB V. PENUTUP	72

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kami dapat menyusun Rencana Kerja (renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dalam rangka tindak lanjut penjabaran Tujuan dan Sasaran Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rancangan Rencana Kerja (renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut ini terdapat kekurangan, hal ini disebabkan karena berbagai keterbatasan yang kami miliki. Namun demikian kami tetap berusaha untuk dapat menyusun dokumen renja ini sesuai ketentuan yang akan kami jadikan sebagai pedoman untuk mencapai kinerja yang lebih baik dan sesuai dengan apa yang kami harapkan.

Akhirnya kami berharap Rancangan Rencana Kerja (renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi kami khususnya jajaran aparat di lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pelaihari, Juli 2023
Sekretaris DPRD
Kabupaten Tanah Laut,

Ir. H. MUHAMMAD MURSYI, Msi
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19680304 199803 1 009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut adalah dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut untuk periode 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap pengelola Pemerintahan diwajibkan menyusun Rencana Kerja SKPD.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Peran serta lembaga Sekretariat DPRD memiliki arti penting karena memfasilitasi lembaga DPRD melalui alat kelengkapannya agar senantiasa dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara proporsional sebagai wujud dari fungsi sebagai Perwakilan

Rakyat. Peran serta lembaga DPRD sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai arti penting mengingat lembaga legislatif di daerah mempunyai fungsi pengawasan, Fungsi pembentukan peraturan daerah serta fungsi anggaran. Sekretariat DPRD memfasilitasi DPRD sebagai mitra sejajar eksekutif untuk bersama-sama dalam menentukan kebijakan Pemerintah Daerah berbasis potensi sumber daya daerah, aspirasi masyarakat serta kepentingan yang selaras dengan kebutuhan daerah.

Untuk itu dalam menyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dengan memperhatikan beberapa dokumen sesuai dengan tahapan proses perencanaan pembangunan daerah, yakni Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan memperhatikan pada tujuan dan sasaran SKPD dan Pohon Kinerja SKPD yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut dilengkapi juga dengan lampiran yang berisi uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta volume dan usulan biaya sebagai bahan acuan yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah dimutakhirkan.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut disusun dengan mengacu pada landasan hukum yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tamabahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 39);
17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 3A, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 32);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memfasilitasi seluruh kegiatan DPRD dalam rangka pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran, sehingga dapat lebih memperjuangkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah dalam rangka perwujudan *Good Governance*. Disamping itu

Rencana Kerja (Renja) ini juga dimaksudkan sebagai kerangka bagi arah pembangunan untuk 1 (satu) tahun kedepan dalam Program serta sebagai tolak ukur pertanggungjawaban Sekretariat DPRD pada akhir tahun anggaran.

1.3.2 Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Renja ini antara lain sebagai berikut :

1. Tersusunnya Instrumen Rencana Kerja yang merupakan dokumen untuk meningkatkan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut dalam memfasilitasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPRD yang tercantum sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Tersusunnya instrument pengukuran kinerja pembangunan.
3. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai dengan skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan.
4. Tersusunnya seluruh Program agar lebih terfokus dan tepat sasaran Sebagai bahan masukan / landasan guna menyusun kegiatan Tahun 2024 sesuai Ketentuan.
5. Tersusunnya Rencana Kerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD kabupaten Tanah Laut.
6. Tersusunnya sub - sub Kegiatan dan Alokasi Pembiayaan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran.
7. Tersusunnya rancangan platform anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan;
8. Menjadi dasar atau pedoman dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja perangkat Daerah (RKA-SKPD) APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka Renja ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan Pegangan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut dalam menyelenggarakan tugas – tugas Pemerintahan dan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut yang

berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut :

1. Tugas Pokok :

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Sekretariat DPRD mempunyai Fungsi :

1. Menyelenggarakan Administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Menyelenggarakan Administrasi Keuangan;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4. Penyediaan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya:

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui materi secara keseluruhan dari dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut, perlu disampaikan sistematika Penyusunan Renja ini, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan renja perangkat daerah agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan Proses Penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang – undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan Lainnya yang mengatur tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja, Kewenangan perangkat Daerah, Serta Pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok Bahasan dalam Penulisan Renja perangkat daerah, serta Susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Lalu (tahun n-2) dan Perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target

Renstra Perangkat Daerah Berdasarkan Realisasi Program dan Kegiatan pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok – pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain ;

1. Realisasi Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis Indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing – masing perangkat daerah, serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika perangkat daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing – masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini diperlukan tabel Analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah, yang disesuaikan menurut perangkat daerah masing masing.

2.3. Isu – Isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai ;

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.
4. Formulasi Isu –isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menguraikan hasil kajian terhadap Program / Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi – Asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat daerah Kabupaten / Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah Provinsi dari lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten / kota sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

4.1 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai;

- a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan.
- b. Uraian Garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain meliputi ;
 - jumlah program dan kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana / pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya,
- c. Penjelasan jika rumusan Program dan Kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana Program dan Kegiatan.

BAB IV P E N U T U P

Berisikan uraian Penutup berupa ;

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan.
- b. Kaidah – kaidah pelaksanaan dan;
- c. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis yang berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Strategi instansi Pemerintah, dalam hal ini Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 juga dilakukan evaluasi.

Tabel 2.1.1
Program dan Kegiatan TA. 2022 (n-2)

NO.	PROGRAM /KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
	Layanan Administrasi DPRD	
		Fasilitasi Fraksi DPRD
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
Pembahasan Kebijakan Anggaran	
	Pembahasan APBD
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
	Pengawasan Penggunaan Anggaran
Peningkatan Kapasitas DPRD	
	Pendalaman Tugas DPRD
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Fasilitasi Tugas DPRD	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

Tabel 2.1.2
Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut
TA. 2022 (n-2)

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	PROSENTASE	
			FISIK	KEUANGAN
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	26.231.786.316	16.703.888.024		63,68
Fasilitasi Tugas DPRD				
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	14.048.620.198	9.344.032.565	84,00	66,51
Pembahasan Kebijakan Anggaran				
Pembahasan APBD	94.394.280	38.438.200	43,07	40,72
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	85.760.449	3.567.000	59,33	4,16
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6.997.821.500	4.254.200.386	68,00	60,79
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	9.796.309	2.645.800	65,00	27,01
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	205.878.503	155.566.200	98,00	75,56

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				
Pengawasan Penggunaan Anggaran	67.398.169	14.827.700	75,00	22,00
Peningkatan Kapasitas DPRD				
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	405.495.000	336.000.000	90,00	82,86
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	778.261.715	466.744.776	78,00	59,97
Pendalaman Tugas DPRD	2.164.425.000	1.132.384.097	75,00	52,32
			95,00	91,06
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1.074.297.701	682.638.800	70,00	63,54
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	37.163.013.501	33.407.338.392		89,89
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	323.500.000	101.948.786	55,00	31,51
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.586.898	13.133.100	95,00	74,68
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.053.614.428	4.466.601.769	100,00	88,38
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	39.987.385	24.898.300	98,33	62,27
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.591.393	17.328.650	96,33	58,56
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.141.497.250	2.075.250.765	98,00	96,91
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.304.939	10.308.332	99,00	91,18
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.586.745	14.301.710	100,00	58,17
Layanan Administrasi DPRD				
Fasilitasi Fraksi DPRD	33.554.289	9.423.000	77,50	28,08
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	798.744.436	762.574.000	100,00	95,47
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	70.000.000	57.957.000	100,00	83
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	405.193.250	325.775.900	100,00	80,40
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	24.756.352.220	22.740.993.779	100,00	91,86
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	202.500.720	130.180.000	80,00	64,29
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	234.833.680	166.848.226	80,00	71,05
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	215.925.851	153.256.300	78,00	70,98
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.670.000	33.519.800	55,00	50,28
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.939.534	137.780.000	80,00	72,16

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.172.858.967	945.727.522	90,00	80,63
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.241.100	14.034.157	100,00	86,41
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	311.290.912	258.810.236	95,00	83,14
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	973.967.400	919.702.560	99,57	94,43
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72.272.104	26.984.500	41,00	37,34
JUMLAH	63.394.799.817	50.111.226.416		79,05

Berikut tabel Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021:

Tabel TC-29
Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Sekretariat DPRD

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2021 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)						
							I		II		III		IV						12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp
Semua bidang																								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				37.163.013.501	9.541.767.745	6.015.737.208	8.737.158.079	9.112.675.360	33.407.338.392	89,89%	33.407.338.392	0,00%										
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas* (%)	0,00	-0,00	-100	72.272.104	33	2.467.500	33	-	56	11.058.400	-	13.458.600	-	26.984.500	0,00%	37,34%	0,00	26.984.500	0,00%	0,00%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun* ()	0,00	-0,00	-	9	72.272.104	3	2.467.500	2	-	2	11.058.400	2	13.458.600	9	26.984.500	100,00%	37,34%	9,00	26.984.500	0,00%	0,00%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah (%)	0,00	-0,00	-100	5.111.188.711	30	945.524.802	55	1.162.406.057	90	1.231.254.919	-	1.165.447.391	-	4.504.633.169	0,00%	88,13%	0,00	4.504.633.169	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayaran Gaji dan Tunjangan Serta Tambahan Penghasilan ASN (Bulan)	0,00	-0,00	-	12	5.053.614.428	3	945.524.802	6	1.146.702.257	9	1.216.078.919	12	1.158.295.791	12	4.466.601.769	100,00%	88,38%	12,00	4.466.601.769	0,00%	0,00%
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0,00	-0,00	-	81	17.586.898	33	-	72	6.493.500	109	-	155	6.639.600	155	13.133.100	191,36%	74,68%	155,00	13.133.100	0,00%	0,00%
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi SKPD yang tersusun* (dokumen)	0,00	-0,00	-	347	39.987.385	87	-	107	9.210.300	86	15.176.000	67	512.000	347	24.898.300	100,00%	62,27%	347,00	24.898.300	0,00%	0,00%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	0,00	-0,00	-100	323.500.000	-	84.937.996	45	-	50	7.231.010	-	9.779.780	-	101.948.786	0,00%	31,51%	0,00	101.948.786	0,00%	0,00%	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan* (orang)	0,00	-0,00	-	20	323.500.000	9	84.937.996	10	-	11	7.231.010	11	9.779.780	11	101.948.786	55,00%	31,51%	11,00	101.948.786	0,00%	0,00%
		Administrasi Umum Perangkat	Persentase pemenuhan Administrasi Umum	0,00	-0,00	-100	2.206.980.327	17	676.750.983	58	540.281.494	-	373.022.299	-	527.134.681	-	2.117.189.457	0,00%	95,93%	0,00	2.117.189.457	0,00%	0,00%	

Daerah	Perangkat Daerah (%)																							
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*) (unit)	0,00	-0,00	-13	11.304.939	1	1.380.000	2	8.928.332	13	-	13	-	13	10.308.332	100,00%	91,18%	13,00	10.308.332	0,00%	0,00%			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*) (unit)	0,00	-0,00	-21	24.586.745	-	-	-	-	-	13.469.710	21	832.000	21	14.301.710	100,00%	58,17%	21,00	14.301.710	0,00%	0,00%			
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan*) (unit)	0,00	-0,00	-12	29.591.393	-	-	2	16.174.650	12	1.154.000	12	-	12	17.328.650	100,00%	58,56%	12,00	17.328.650	0,00%	0,00%			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*) (kali)	0,00	-0,00	-75	2.141.497.250	17	675.370.983	139	515.178.512	243	358.398.589	472	526.302.681	472	2.075.250.765	629,33%	96,91%	472,00	2.075.250.765	0,00%	0,00%			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu*) (%)	0,00	-0,00	-100	1.172.858.967	-	112.285.793	53	125.179.649	-	289.773.000	-	418.489.080	53	945.727.522	52,90%	80,63%	52,90	945.727.522	0,00%	0,00%			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan*) (unit)	0,00	-0,00	-17	1.172.858.967	3	112.285.793	9	125.179.649	12	289.773.000	14	418.489.080	14	945.727.522	82,35%	80,63%	14,00	945.727.522	0,00%	0,00%			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*) (%)	0,00	-0,00	-100	1.301.499.412	-	275.821.515	35	304.661.727	75	304.137.942	-	307.925.769	-	1.192.546.953	0,00%	91,63%	0,00	1.192.546.953	0,00%	0,00%			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*) (bulan)	0,00	-0,00	-12	311.290.912	3	59.564.475	6	59.536.930	9	70.828.002	12	68.880.829	12	258.810.236	100,00%	83,14%	12,00	258.810.236	0,00%	0,00%			
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*) (bulan)	0,00	-0,00	-27	16.241.100	-	-	5	6.399.157	20	-	27	7.635.000	27	14.034.157	100,00%	86,41%	27,00	14.034.157	0,00%	0,00%			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor*) (bulan)	0,00	-0,00	-432	973.967.400	108	216.257.040	216	238.725.640	324	233.309.940	432	231.409.940	432	919.702.560	100,00%	94,43%	432,00	919.702.560	0,00%	0,00%			

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
				7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%									
		Pemeiharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *) (%)	0,00	- 0,00	- 100	910.869.785	-	20.585.800	24	105.950.750	-	218.964.876	-	276.082.900	-	621.584.326	0,00%	68,24%	0,00	621.584.326	0,00%	0,00%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara*) (unit)	0,00	- 0,00	- 4	234.833.680	1	17.676.000	1	21.696.000	2	60.161.326	4	67.314.900	4	166.848.226	100,00%	71,05%	4,00	166.848.226	0,00%	0,00%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara*) (unit)	0,00	- 0,00	- 21	215.925.851	-	-	12	74.884.750	18	45.773.550	21	32.598.000	21	153.256.300	100,00%	70,98%	21,00	153.256.300	0,00%	0,00%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara*) (unit)	0,00	- 0,00	- 9	66.670.000	-	2.909.800	2	4.465.000	6	-	9	26.145.000	9	33.519.800	100,00%	50,28%	9,00	33.519.800	0,00%	0,00%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara*) (unit)	0,00	- 0,00	- 5	190.939.534	-	-	-	-	-	113.030.000	1	24.750.000	1	137.780.000	20,00%	72,16%	1,00	137.780.000	0,00%	0,00%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara*) (unit)	0,00	- 0,00	- 6	202.500.720	-	-	1	4.905.000	-	-	5	125.275.000	5	130.180.000	83,33%	64,29%	5,00	130.180.000	0,00%	0,00%
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Prosentasi pemenuhan Hak Administrasi dan Keuangan Anggota DPRD (100%)	0,00	- 0,00	- 100	25.231.545.470	-	7.378.013.356	17	3.661.422.531	81	6.083.945.633	-	6.001.345.159	-	23.124.726.679	0,00%	91,65%	0,00	23.124.726.679	0,00%	0,00%
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Lerbayarnya Gaji dan Tunjangan DPRD (Tahun)	0,00	- 0,00	- 12	24.756.352.220	3	7.378.013.356	6	3.661.422.531	9	5.913.044.733	12	5.788.513.159	12	22.740.993.779	100,00%	91,86%	12,00	22.740.993.779	0,00%	0,00%
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya Atribut Pakaian Dinas untuk DPRD dan Sekwan , Tersedianya Pakaian Batik Tradisional untuk DPRD, Tersedianya PDH untuk DPRD dan Sekwan, Tersedianya PSH untuk DPRD, Tersedianya PSL untuk DPRD dan Sekwan , Tersedianya PSR untuk DPRD dan Sekwan (Jenis dan Stel)	0,00	- 0,00	- 152	405.193.250	-	-	-	-	-	170.900.900	152	154.875.000	152	325.775.900	100,00%	80,40%	152,00	325.775.900	0,00%	0,00%
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya Medical Check UP DPRD (Orang)	0,00	- 0,00	- 35	70.000.000	-	-	-	-	-	-	31	57.957.000	31	57.957.000	88,57%	82,80%	31,00	57.957.000	0,00%	0,00%
		Layanan Administrasi DPRD	Prosentasi pemenuhan Terfasilitasinya kegiatan fraksi dan kegiatan rapat DPRD (100%)	0,00	- 0,00	- 100	832.298.725	-	45.380.000	15	115.835.000	38	217.770.000	-	393.012.000	-	771.997.000	0,00%	92,75%	0,00	771.997.000	0,00%	0,00%
		Fasilitas Fraksi DPRD	Jumlah Peserta Rapat (Orang)	0,00	- 0,00	- 192	33.554.289	-	1.850.000	-	1.440.000	-	2.900.000	2	3.233.000	2	9.423.000	1,04%	28,08%	2,00	9.423.000	0,00%	0,00%
		Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Rapat Koordinasi (Kali)	0,00	- 0,00	- 308	798.744.436	45	43.530.000	92	114.395.000	167	214.870.000	270	389.779.000	270	762.574.000	87,66%	95,47%	270,00	762.574.000	0,00%	0,00%
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	128,72%	89,89%				
																	Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi				
		SEKRETARIAT DPRD																					

		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			-	-	26.231.786.316	2.439.495.634	3.927.389.802	4.637.912.795	5.699.089.793	16.703.888.024	63,68%	16.703.888.024	0,00%										
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Prosentasi pemenuhan Terfasilitasinya Proses dan Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD untuk Kemajuan Daerah (100%)	0,00	-	0,00	-	100	7.299.256.761	-	224.461.740	7	209.505.896	10	2.011.808.265	-	1.970.203.485	-	4.415.979.386	0,00%	60,50%	0,00	4.415.979.386	0,00%	0,00%
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	19	85.760.449	-	-	1	-	4	962.000	9	2.605.000	9	3.567.000	47,37%	4,16%	9,00	3.567.000	0,00%	0,00%
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	19	6.997.821.500	-	224.461.740	1	209.505.896	4	2.010.846.265	9	1.809.386.485	9	4.254.200.386	47,37%	60,79%	9,00	4.254.200.386	0,00%	0,00%
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	19	9.796.309	-	-	1	-	4	-	9	2.645.800	9	2.645.800	47,37%	27,01%	9,00	2.645.800	0,00%	0,00%

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2021 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)				
							I		II		III		IV			12		13=12/x100%		14 = 6 +12		15=14/5 x100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	0,00	-0,00	-	3	205.878.503	-	-	-	-	-	3	155.566.200	3	155.566.200	100,00%	75,56%	3,00	155.566.200	0,00%	0,00%	
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Prosentasi pemenuhan Terfasilitasinya Proses dan Mekanisme Pembahasan Kebijakan Anggaran sampai dengan Pertanggungjawaban APBD (100%)	0,00	-0,00	-	100	94.394.280	-	-	-	43	14.325.400	-	24.112.800	-	38.438.200	0,00%	40,72%	0,00	38.438.200	0,00%	0,00%	
		Pembahasan APBD	Tersedianya Bahan Pembahasan APBD (Buku)	0,00	-0,00	-	4	94.394.280	-	-	-	-	14.325.400	4	24.112.800	4	38.438.200	100,00%	40,72%	4,00	38.438.200	0,00%	0,00%	
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentasi pemenuhan Terfasilitasinya Fungsi Pengawasan DPRD (100%)	0,00	-0,00	-	100	67.398.169	-	-	14	11.911.700	14	2.916.000	-	-	-	14.827.700	0,00%	22,00%	0,00	14.827.700	0,00%	0,00%
		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Tersedianya bahan untuk pengawasan Anggaran (Eksemplar)	0,00	-0,00	-	7	67.398.169	-	-	1	11.911.700	2	2.916.000	-	-	-	14.827.700	0,00%	22,00%	0,00	14.827.700	0,00%	0,00%
		Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentasi pemenuhan a kualitas Kinerja DPRD secara Profesional dan Terukur yang mewakili Aspirasi Masyarakat Kabupaten Tanah Laut (100%)	0,00	-0,00	-	100	3.647.819.207	-	297.886.076	45	647.644.300	-	465.886.697	-	796.554.300	-2.207.971.373	0,00%	60,53%	0,00	2.207.971.373	0,00%	0,00%	
		Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Kegiatan Bimtek DPRD (Kali)	0,00	-0,00	-	5	2.164.425.000	-	128.533.800	1	403.395.800	6	186.910.947	10	413.543.550	10	1.132.384.097	200,00%	52,32%	10,00	1.132.384.097	0,00%	0,00%
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi Dewan (Tahun)	0,00	-0,00	-	340	778.261.715	87	18.152.276	186	89.006.000	345	127.775.750	417	231.810.750	417	466.744.776	122,65%	59,97%	417,00	466.744.776	0,00%	0,00%
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Terbayarnya Honor Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD (Tahun)	0,00	-0,00	-	96	405.495.000	24	84.000.000	48	84.000.000	72	84.000.000	96	84.000.000	96	336.000.000	100,00%	82,86%	96,00	336.000.000	0,00%	0,00%
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terbayarnya Tenaga Ahli Fraksi DPRD ,Terpenuhinya Tenaga Ahli Fraksi DPRD (Tahun/Orang)	0,00	-0,00	-	96	299.637.492	24	67.200.000	48	71.242.500	72	67.200.000	96	67.200.000	96	272.842.500	100,00%	91,06%	96,00	272.842.500	0,00%	0,00%

	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Prosentasi pemenuhan Proses dan Mekanisme Penjaringan Aspirasi Masyarakat Kabupaten Tanah Laut melalui Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut (100%)	0,00	-0,00	-	100	1.074.297.701	-	19.792.800	50	221.379.900	100	210.928.100	-	230.538.000	-	682.638.800	0,00%	63,54%	0,00	682.638.800	0,00%	0,00%
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Tersusunnya Dokumen Pokir DPRD (Buku)	0,00	-0,00	-	2	1.074.297.701	-	19.792.800	1	221.379.900	-	210.928.100	1	230.538.000	1	682.638.800	50,00%	63,54%	1,00	682.638.800	0,00%	0,00%
	Fasilitasi Tugas DPRD	Prosentasi pemenuhan Terfasilitasinya tugas pokok dan Fungsi DPRD (100%)	0,00	-0,00	-	100	14.048.620.198	-	1.897.355.018	36	2.836.948.006	98	1.932.048.333	-	2.677.681.208	-	9.344.032.565	0,00%	66,51%	0,00	9.344.032.565	0,00%	0,00%
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi untuk menunjang kinerja DPRD (Tahun)	0,00	-0,00	-	1102	14.048.620.198	376	1.897.355.018	788	2.836.948.006	1.051	1.932.048.333	1.452	2.677.681.208	1.452	9.344.032.565	131,76%	66,51%	1452,00	9.344.032.565	0,00%	0,00%
	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	109,40%	63,68%				
	Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Rendah				
	63.394.799.817							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM							120,72%		79,05%						
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																	Sangat Tinggi	Tinggi				

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berikuti ini ditampilkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut sebagai Berikut :

Target IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS		TARGET
	URAIAN	INDIKATOR	2022
1	Meningkatnya kinerja Layanan Sekretariat DPRD untuk menunjang Urusan Administrasi Pemerintahan dalam penyelenggaraan tugas dan Fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	77,10 (Baik)

Tabel TC- 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada tahun					Realisasi Capaian pada tahun				Proyeksi pada tahun	
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya kinerja Layanan DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	Meningkatnya kinerja Layanan Sekretariat DPRD untuk menunjang Urusan Administrasi Pemerintahan dalam penyelenggaraan tugas dan Fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	77,07	77,08	77,09	77,10	77,11	77,07	77,3	77,7	78,26	77,9	
					Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
2			Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian	Persentasi pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang tertib	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	94%	100,23 %	100%	
				Persentasi Pemenuhan tenaga ahli DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	320%	320%	100%	
				Persentasi pemenuhan layanan sarana dan Prasarana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	114%	251,92 %	100%

		Persentasi Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	100%	100%	100%	100%	100%	89%	80%	66%	67,37%	100%	
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Informasi Publik, kehumasan dan keprotokolannya DPRD	Persentasi Kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan keprotokolannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%	127%	176%	100%	
		Persentasi penyebarluasan informasi / pemberitaan penyelenggaraan DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	166%	107,70 %	100%
4	Meningkatkan kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan, pelaporan kinerja dan pelaporan Keuangan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	B	BB	BB, 75	BB, 75	BB, 75	B, 67,54	BB, 76,08	BB, 77,89	BB, 79,50	BB, 79,60	
5	Meningkatnya fasilitasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD	Persentasi Rapat yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	97%	97%	131.76 %	106,67 %	100%	
		Persentasi Fasilitasi Pembahasan rancangan Perda	100%	100%	100%	100%	100%	127%	100%	72%	66,67%	100%	

				Persentasi kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	100%	67%	100%
				Persentasi kegiatan Reses yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan;
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi;
3. Infrastruktur Dasar Dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas;
4. Reformasi Birokrasi;
5. Penyangga Pangan IKN;
6. Pembangunan Berkelanjutan(SDG's)

Sedangkan tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026 Kabupaten Tanah Laut adalah :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik (Good Governance);
3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat Secara merata dengan pembangunan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan

Dari tujuan di atas, Sekretariat DPRD termasuk pada tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik (Good Governance). Untuk pengelolaan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran yang ingin dicapai yaitu "Meningkatnya kinerja Layanan Sekretariat DPRD kepada anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dari beberapa faktor yang telah dikemukakan sebelumnya dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni untuk memfasilitasi kegiatan DPRD dan mengkoordinasikan kegiatan DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka dapat ditentukan isu-isu strategis, yaitu sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD;
2. Belum Optimalnya Capaian Kinerja Sekretariat DPRD;

3. Keterbatasan sumber daya manusia (pegawai), sarana / prasarana yang belum lengkap dan kurang memadai perlu makin ditingkatkan guna mendukung perkembangan tugas-tugas Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan;
4. Tuntutan pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD, merupakan tantangan yang harus direspon dengan baik, melalui dukungan kinerja staf Sekretariat DPRD, berupa pemikiran dan gerak pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan Profesional serta mampu melaksanakan tugas dengan baik dan benar agar lebih berkualitas;
5. Para PPTK yang masih optimal dalam merencanakan kegiatan mulai dari Proses Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pertanggungjawaban keuangan;
6. Kurangnya koordinasi antar bagian yang menyebabkan terdapatnya ketidakserasian dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh bagian dalam sekretariat DPRD;
7. Perkembangan dan Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data yang begitu cepat namun daya dukung aparatur dan sistem yang masih kurang memadai sehingga terjadi ketimpangan dan ketidakseimbangan sehingga berpengaruh pada kinerja dan terkesan lamban.
8. Adanya penyederhanaan jabatan eselon IV menjadi jabatan fungsional tertentu, hal ini memerlukan proses penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan SKPD.

Dalam hal melakukan analisis untuk menentukan strategi, sasaran, program dan kegiatan tahunan pada renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 ini, maka terdapat faktor – faktor tantangan dan peluang maupun kekuatan dan kelemahan / hambatan dalam rangka meningkatkan pelayanan SKPD.

1. Faktor tantangan / ancaman yang perlu diantisipasi antara lain :
 1. 1. Sebagai organisasi yang tidak dapat dipisahkan dari lembaga politik, Sekretariat DPRD mendapat imbas kepentingan politik yang dibanding SKPD lainnya.

1. 2. Berbagai macam regulasi dan aturan yang mengikat kepada ASN sehingga pelaksanaan tugas yang dilaksanakan berimbas pada kinerja Sekretariat DPRD;

2. Faktor Peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain :
 - 2.1. Semakin mapannya regulasi bidang politik khususnya yang berkaitan dengan Pembentukan Perda melalui alat kelengkapan DPRD sehingga proses pengelolaan Administrasi pemerintahan memiliki regulasi yang jelas dan pasti.
 - 2.2. Meningkatnya peran serta partisipasi Masyarakat dalam perencanaan dan pembentukan Raperda serta pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dibidang pengawasan dan anggaran.
 - 2.3. Kualitas sumber daya anggota DPRD semakin membaik sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi pemerintahan.

3. Faktor Kekuatan yang bisa digunakan antara lain :
 - 3.1. Eksistensi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut sebagai sistem pendukung (supporting system) pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 - 3.2. Dokumen-dokumen pendukung yang disiapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut sebagai acuan dalam perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan tugas serta fungsi DPRD lainnya sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang – undangan.
 - 3.3. Adanya Standar Operasional Prosedur yang telah disusun dapat menjadikan kekuatan tersendiri dalam mekanisme dan prosedur yang dapat

mendukung kegiatan berjalan dengan baik dan menjadi sandaran dalam pengelolaan administrasi untuk lebih tertib dan menjadi lebih baik.

4. Faktor kelemahan yang perlu diperhatikan antara lain :
 - 4.1. Kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur khususnya staf relatif masih perlu ditingkatkan.
 - 4.2. Adanya Protokol Kesehatan yang harus dijalankan sementara ruang lingkup Lembaga DPRD yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD adalah Wadah untuk mempertemukan dua arah dan mengumpulkan orang sementara Fasilitas ruang pertemuan masih terbatas.
 - 4.3. Belum Optimalnya tenaga Ahli DPRD untuk memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD;
 - 4.4. Secara Kelembagaan DPRD Kabupaten Tanah Laut belum mempunyai tenaga perancang peraturan perundang-undangan dan belum tersedianya tenaga penyelia (Supervisor) sidang dan rapat yang profesional;

Permasalahan dan hambatan ini secara umum berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, namun secara khusus tugas dan fungsi Sekretariat DPRD berkolerasi dalam mendukung pencapaian misi reformasi dan birokrasi, peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Mengacu pada uraian diatas, maka dapat diformulasikan isu – isu penting dalam rangka pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD tersebut diperlukan kualitas penyelenggaraan pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut meliputi hal –hal sebagai berikut :

- 1 Peningkatan kualitas pelayanan administrasi publik dan fasilitasi terhadap kegiatan DPRD berkaitan dengan produk hukum seperti pembahasan Raperda, Keputusan DPRD dan Raperda Inisiatif. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan rapat – rapat dewan, kegiatan Reses, hearing, kunjungan kerja dalam dan luar daerah serta peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.

- 2 Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran dengan memanfaatkan peralatan modern dan teknologi informasi untuk mengelola data dan informasi yang bertujuan agar agenda persidangan dapat dilaksanakan lebih cepat dan baik.
- 3 Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM menjadi isu penting dan harus ditindak lanjuti dengan upaya meningkatkan kemampuan administrasi umum maupun kemampuan teknis, program Diklat dan Bimtek bidang manajemen Pemerintahan, keprotokolan dan teknis pengadaan barang dan jasa masih sangat perlu ditingkatkan.
- 4 Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan Rakyat daerah perlu ditingkatkan dengan kegiatan – kegiatan yang lebih berorientasi pada peningkatan penguasaan peraturan perundang – undangan, penguasaan sistem perencanaan daerah yang pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan anggota DPRD tentang pemerintahan daerah.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam pelaksanaan program kegiatan yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024, Program dan kegiatan yang diusulkan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah agar selaras dan berkesuaian dengan renstra SKPD dan RPJMD yang telah ditetapkan.

Kegiatan Sekretariat DPRD yang tercantum dalam permendagri Nomor 90 Tahun 2019 masih ditempatkan pada Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan sehingga tidak terlalu menyimpang jauh dari program dan kegiatan sebelumnya yang diatur melalui Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 hanya saja jumlah kegiatan yang tercantum lebih banyak namun tidak keluar jauh dari bidang urusan yang ditangani sebelumnya.

Sesuai fungsi dan tugasnya Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut tidak mempunyai usulan program dan kegiatan yang langsung menyentuh kepada

masyarakat, melainkan sekretariat DPRD bertugas melaksanakan fungsi pelayanan dalam bentuk fasilitasi terhadap pelaksanaan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dokumen perencanaan secara hirarki harus berpedoman kepada RPJPD yang memiliki durasi 20 (dua puluh) tahun dan sekaligus menjadi pedoman bagi perencanaan pembangunan tahunan dalam dokumen RKPD. Dalam RPJPD Kabupaten Tanah Laut 2005 2025, ditetapkan visi yakni TANAH LAUT SEBAGAI DAERAH INDUSTRI DAN PELABUHAN MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DIDASARI NILAI NILAI AGAMA dengan misi :

1. Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Nilai Nilai Agama
2. Mewujudkan penegakan supremasi hukum dan ketertiban serta penerapan sistem otonomi daerah dengan tata kelola pemerintahan yang baik
3. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
4. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bertumpu pada pengembangan industri berbasis pertanian kelautan pertambangan dan pariwisata
5. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Pelabuhan Laut Berstandart Internasional
6. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang Berwawasan lingkungan dan Berkelanjutan
7. Mewujudkan Penyiapan Prasarana Pembangunan Bandara

Dalam perkembangan lebih lanjut diterbitkan regulasi berupa Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 yang pada intinya khusus ditujukan kepada daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir tahun 2023, dimana dalam hal ini Kabupaten Tanah Laut masa jabatan Kepala Daerah akan berakhir pada bulan September 2023. Oleh

karena itu maka seluruh Perangkat Daerah menyusun Renstra SKPD yang berdurasi 3 (tiga) tahun yakni tahun 2024 - 2026.

Pembangunan Kabupaten Tanah Laut dalam periode 2024-2026 akan berfokus pada ;

1. Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia dengan Pelayanan Dasar dan Infrastruktur yang berkualitas
2. Peningkatan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
3. Pemantapan Perekonomian Daerah melalui Pembangunan yang Berkelanjutan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Setiap lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga memiliki gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Perumusan Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu Perangkat Daerah tentunya mengacu kepada tugas pokok dan fungsi sebagaimana dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut dimana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 pada Nomenklatur Urusan merupakan Salah Satu SKPD yang masuk pada Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan.

Tujuan dan Sasaran dalam RPD tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
 - 1.1 Meningkatnya layanan dan aksesibilitas Pendidikan
 - 1.2 Meningkatnya layanan dan aksesibilitas Kesehatan
 - 1.3 Meningkatnya nilai nilai luhur budaya daerah
 - 1.4 Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga

- 1.5 Meningkatnya peran perempuan dalam Pembangunan
2. Peningkatan Ekonomi Masyarakat Secara merata dengan pembangunan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan Pertumbuhan Ekonomi
 - 2.1 Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan
 - 2.2 Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan
 - 2.3 Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan
 - 2.4 Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pariwisata
 - 2.5 Meningkatnya investasi daerah Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah
 - 2.6 Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas
 - 2.7 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
 - 2.8 Meningkatnya kemandirian PPKS PPKS yang Mandiri
 - 2.9 Meningkatnya ketahanan pangan Indeks Ketahanan Pangan
 - 2.10 Menurunnya tingkat pengangguran Tingkat Pengangguran Terbuka
 - 2.11 Meningkatnya status kemajuan dan kemandirian desa Indeks Desa Membangun
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
 - 3.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah
 - 3.2 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - 3.3 Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Pemerintah
 - 3.4 Meningkatnya Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Berdasar pada uraian tujuan dan sasaran diatas, Sekretariat DPRD mengemban tujuan yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dimana tugas Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi

kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Sasaran organisasi yang merupakan gambaran hal yang ingin di wujudkan melalui tindakan yang diambil organisasi guna mencapai tujuan. Sasaran yang baik melalui beberapa ciri antara lain :

1. Sasaran organisasi yang spesifik karena merupakan panduan untuk kelompok organisasi yang bersangkutan.
2. Sasaran organisasi harus dapat di ukur, karena merupakan standar yang dapat dipakai untuk mengukur kemajuan organisasi. Dimensi ukurannya adalah kualitas, kuantitas, waktu, tempat, anggaran dan pengguna anggaran.
3. Sasaran yang bersifat agresif dan dapat dipakai sebagai standar pencapaian tujuan sehingga harus menantang dan dapat diwujudkan.
4. Sasaran harus menspesifikasikan hasil yang ingin dicapai.

Untuk merealisasikan tujuan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut maka dibuat penjabarannya dalam bentuk sasaran yang merupakan capaian yang lebih rinci. Sasaran yang ingin dicapai Sekretariat Kabupaten Tanah Laut merupakan bagian dalam proses perencanaan strategiknya yang difokuskan kepada tindakan serta alokasi sumber daya yang ada dalam kegiatan maupun operasionalnya, sehingga bersifat lebih spesifik terinci dapat di ukur dan dicapai.

Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Tujuan dan Sasaran serta Target Sekretariat DPRD Tahun 2024

No Target	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Pemerintah	Meningkatnya kinerja Layanan Kepada Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	Indeks Pelayanan Publik Indeks kepuasan Anggota DPRD	4,54 / A 82
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP Kabupaten Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	70.1 (BB) 82

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Pada Bab ini sebelum kami jabarkan terkait program, kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2024 perlu kami sampaikan terlebih dahulu historis dan kronologis Proses Perencanaan sebelum ditetapkan program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Sekretariat DPRD dimana dalam periode tahun keempat Renstra SKPD telah terjadi perubahan yang mendasar pada regulasi tentang perencanaan dan pengelolaan keuangan yaitu dengan terbitnya :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
3. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah);
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130 / 736 / SJ tanggal 27 Januari 2020 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 tentang Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Dengan adanya regulasi yang terbit sebagaimana tersebut diatas Rencana Kerja SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut yang di susun berdasarkan hasil pemetaan, Mepping antar Program dan kegiatan sesuai dengan Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 tentang Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi

Sebelum program dan kegiatan Tahun 2024 ini dicantumkan dalam renja SKPD secara umum perlu kami jelaskan faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yang mendasari penyusunan rencana kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024.

Berdasarkan Pemutahiran Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 tentang Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka untuk Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 yang di susun terdapat 2 (dua) Program, 15 (lima belas) Kegiatan dan 44 (empat puluh empat) Sub Kegiatan, dengan rician sebagai berikut :

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4	02				SEKRETARIAT DPRD
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

4	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD
4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD
4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD
4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD
4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD
4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

Dari Rumusan Progam, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Pemutakhiran Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 tentang Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana tersebut diatas secara Variabel Program Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut direncanakan akan digunakan pada tahun 2024, tentunya telah dipertimbangkan dalam rumusan untuk menentukan rencana kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024.

Adapun Program, kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Sekretariat DPRD Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kab. Tanah Laut
Tahun 2024**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Uru san / Bida ng Uru san / Prog ram / Kegi atan / Sub Kegi atan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Cata tan Pen ting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Outpu t Kegiat an	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Prog ram	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegi atan				Tolak Ukur	Targ et	
		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah						61.939.110.442,00					67.696.063.342,00	
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						61.939.110.442,00					67.696.063.342,00	
4	02	SEKRETARIAT DPRD						61.939.110.442,00					67.696.063.342,00	
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						38.447.541.188,00				36.492.369.099,00	

4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						75.709.885,00						209.715.449,00
4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
					Indeks Kepuasan Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Indeks Kepuasan Bagian Umum Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82 Nilai 82 Nilai	6 Dokumen	100 Perse n	35.711.000,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokume n	39.715.449,00	
4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
					Indeks Kepuasan Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Indeks Kepuasan Bagian Umum Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82 Nilai 82 Nilai	3 Laporan	100 Perse n	39.998.885,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	170.000.000,00	
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.455.515.089,00						5.742.089.000,00
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
					Indeks Kepuasan Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Indeks Kepuasan Bagian Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82 Nilai 82 Nilai	38 Orang/bul an	100 Perse n	5.420.445.805,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/b ulan	5.700.000.000,00	

					Sekretariat DPRD																		
4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
					Indeks Kepuasan Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Indeks Kepuasan Bagian Umum Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82 Nilai 82 Nilai	5 Dokumen	100 Persen	35.069.284,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen			42.089.000,00				
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													289.702.445,00					375.948.000,00
4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
					Indeks Kepuasan Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Indeks Kepuasan Bagian Umum Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82 Nilai 82 Nilai	4 Paket	100 Persen	74.702.445,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket			75.948.000,00				
4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		

					Indeks Kepuasan Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Indeks Kepuasan Bagian Umum Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82 Nilai 82 Nilai	43 Orang	100 Persen	215.000.000,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan	43 Orang	300.000.000,00		
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							1.029.768.572,00					520.000.000,00	
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
					Indeks Kepuasan Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Indeks Kepuasan Bagian Umum Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82 Nilai 82 Nilai	10 Paket	100 Persen	20.313.178,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	20.000.000,00		
4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

					Indeks Kepuasan Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Indeks Kepuasan Bagian Umum Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	82 Nilai 82 Nilai	10 Paket	100 Perse n	138.973.137,00	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Jumlah Paket Peralatan dan Perleng kapan Kantor yang Disediak an	10 Paket	140.000.000,00		
4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
					Indeks Kepuasan Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Indeks Kepuasan Bagian Umum Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	82 Nilai 82 Nilai	1 Paket	100 Perse n	20.006.155,00	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediak an	1 Paket	20.000.000,00		
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
					Indeks Kepuasan Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Indeks Kepuasan Bagian Umum Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	82 Nilai 82 Nilai	2 Paket	100 Perse n	19.711.302,00	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediak an	2 Paket	20.000.000,00		

4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
					Indeks Kepuasan Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Indeks Kepuasan Bagian Umum Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82 Nilai 82 Nilai	1920 Dokumen	100 Perse n	19.980.000,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1920 Dokumen	20.000.000,00	
4	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material													
					Indeks Kepuasan Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Indeks Kepuasan Bagian Umum Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82 Nilai 82 Nilai	2 Paket	100 Perse n	50.000.000,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	50.000.000,00	
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

					Indeks Kepuasan Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Indeks Kepuasan Bagian Umum Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82 Nilai 82 Nilai	75 Laporan	100 Perse n	760.784.800,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	250.000.000,00		
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							2.931.330.767,00						400.000.000,00	
4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
					Indeks Kepuasan Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Indeks Kepuasan Bagian Umum Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82 Nilai 82 Nilai	3 Unit	100 Perse n	2.460.803.167,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	0,00		
4	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

					Indeks Kepuasan Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Indeks Kepuasan Bagian Umum Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82 Nilai 82 Nilai	1 Unit	100 Perse n	72.327.600,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00		
4	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
					Indeks Kepuasan Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Indeks Kepuasan Bagian Umum Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82 Nilai 82 Nilai	1 Unit	100 Perse n	398.200.000,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	400.000.000,00		
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1.459.309.384,00							1.482.000.000,00
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

					Indeks Kepuasan Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Indeks Kepuasan Bagian Umum Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82 Nilai 82 Nilai	12 Laporan	100 Persen	300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	300.000.000,00		
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
					Indeks Kepuasan Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Indeks Kepuasan Bagian Umum Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82 Nilai 82 Nilai	12 Laporan	100 Persen	1.159.309.384,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.182.000.000,00		
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							925.447.125,00							956.250.000,00
4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

					Indeks Kepuasan Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Indeks Kepuasan Bagian Umum Sekretariat DPRD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82 Nilai 82 Nilai	3 Unit	100 Persen	170.118.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	250.000.000,00
4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											

					Indeks Kepuasan Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Indeks Kepuasan Bagian Umum Sekretariat DPRD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82 Nilai 82 Nilai	23 Unit	100 Persen	195.028.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	200.000.000,00
4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel												
					Indeks Kepuasan Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Indeks Kepuasan Bagian Umum Sekretariat DPRD	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82 Nilai 82 Nilai	2 Unit	100 Persen	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	6.250.000,00
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												

					Indeks Kepuasan Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Indeks Kepuasan Bagian Umum Sekretariat DPRD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82 Nilai 82 Nilai	57 Unit	100 Perse n	154.653.125,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57 Unit	100.000.000,00
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
					Indeks Kepuasan Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Indeks Kepuasan Bagian Umum Sekretariat DPRD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau	82 Nilai 82 Nilai	3 Unit	100 Perse n	299.736.000,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	300.000.000,00
4	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												

					Indeks Kepuasan Bagian Keuangan Sekretariat DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Tanah Laut, Pelayari, Angsau	82 Nilai 82 Nilai	1 Unit	100 Perse n	99.912.000,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD							25.357.569.986,00				25.409.366.650,00	
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD												
					Indeks Kepuasan Bagian Keuangan Sekretariat DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Persentase Capaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82 Nilai 82 Nilai	35 Orang/Bulan	100 Perse n	24.756.352.220,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35 Orang/Bulan	24.756.352.000,00	
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD												

					Indeks Kepuasan Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Indeks Kepuasan Bagian Umum Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Persentase Capaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82 Nilai 82 Nilai	140 Paket	100 Persen	457.221.766,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	140 Paket	509.018.650,00				
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																
					Indeks Kepuasan Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Indeks Kepuasan Bagian Umum Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Persentase Capaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82 Nilai 82 Nilai	35 Orang	100 Persen	143.996.000,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 Orang	143.996.000,00				
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD												923.187.935,00				1.397.000.000,00
4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																
					Indeks Kepuasan Bagian Umum Sekretariat DPRD Indeks Kepuasan Bagian Keuangan Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Persentase Capaian Layanan Administrasi DPRD	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82 Nilai 82 Nilai	16 Laporan	100 Persen	19.996.710,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	16 Laporan	20.000.000,00				

4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD												
					Indeks Kepuasan Bagian Umum Sekretariat DPRD Indeks Kepuasan Bagian Keuangan Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase Capaian Layanan Administrasi DPRD	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82 Nilai 82 Nilai	275 Laporan	100 Perse n	901.991.225,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	275 Laporan	957.000.000,00
4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD												
					Indeks Kepuasan Bagian Umum Sekretariat DPRD Indeks Kepuasan Bagian Keuangan Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Persentase Capaian Layanan Administrasi DPRD	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82 Nilai 82 Nilai	1 Paket	100 Perse n	1.200.000,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1 Paket	420.000.000,00
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						23.491.569.254,00						31.203.694.243,00
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						6.317.742.222,00						8.239.878.503,00
4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah												

					Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Capaian Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Nilai 100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	9.999.642,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	10.000.000,00
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah											

					Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase Capaian Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Nilai 100 Persen	15 Dokumen	100 Persen	6.237.742.819,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15 Dokumen	8.019.000.000,00
4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan											

					Persentase Pelaksanaan Fasilitas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Persentase Capaian Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Nilai 100 Persen	15 Dokumen	100 Persen	4.999.761,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	15 Dokumen	5.000.000,00
4	02	02	2.01	0004	Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik											

					Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan yang Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Persentase Capaian Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Nilai 100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	65.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	205.878.503,00		
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran							50.027.270,00					50.000.000,00	
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD													

					Persentase Pelaksanaan Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan yang Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku	Persentase Pelaksanaan Fasilitas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Persentase Capaian Pembahasan Kebijakan Anggaran	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen 100 Nilai	2 Dokumen	100 Persen	50.027.270,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dokumen	50.000.000,00		
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan								28.110.363,00					15.000.000,00	
4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														

					Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	Persentase Capaian Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Nilai 100 Persen	3 Laporan	100 Persen	28.110.363,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	3 Laporan	15.000.000,00	
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD							2.912.731.526,00				3.867.815.740,00	
4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD												

					Persentase Pelaksanaan Fasilitas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Persentase Capaian Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Nilai 100 Persen	35 Dokumen	100 Persen	425.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	35 Dokumen	0,00
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD											

					Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Persentase Capaian Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Nilai 100 Persen	105 Dokumen	100 Persen	1.153.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	105 Dokumen	2.665.499.999,00
4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli											

					Persentase Pelaksanaan Fasilitas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Persentase Capaian Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Nilai 100 Persen	8 Orang	100 Persen	357.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	8 Orang	405.495.000,00
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi											

					Persentase Pelaksanaan Fasilitas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Persentase Capaian Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Nilai 100 Persen	8 Orang	100 Persen	336.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	336.000.000,00
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD											

					Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Persentase Capaian Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Nilai 100 Perse n	50 Dokumen	100 Perse n	640.481.526,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	50 Dokumen	460.820.741,00
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat							973.910.804,00				1.031.000.000,00
4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD											

					Persentase Pelaksanaan Fasilitas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Persentase Capaian Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Nilai 100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	12.000.966,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	12.000.000,00
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses											

					Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Persentase Capaian Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Nilai 100 Persen	3 Dokumen	100 Persen	961.909.838,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	1.019.000.000,00	
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD							13.209.047.069,00				18.000.000.000,00	
4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD												

					Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Capaian Fasilitasi Tugas DPRD	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Nilai 100 Perse n	200 Dokumen	100 Perse n	13.209.047.069,00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	200 Dokumen	18.000.000.000,00
TOTAL													61.939.110.442,00		67.696.063.342,00		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 disusun sebagai panduan dan pedoman untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Penyusunan Renja SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 ini didasarkan pada :

1. Kondisi yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut.
2. Keperluan semua unit kerja yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut .
3. Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 – 2026.
4. Arahan dari pimpinan instansi.
5. Berprinsip dinamis yaitu dapat mengikuti perubahan baik internal maupun eksternal.

Pelaihari, Juli 2023

Sekretaris DPRD
Kabupaten Tanah Laut,

Ir. H. MUHAMMAD MURSYI
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19680304 199803 1 009